

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP CERAH GUGAT
DIKALANGAN TENAGA KERJA WANITA (TKW)
(Studi Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt.)**



**Disusun sebagai salahsatu syarat menyelesaikan Program
Studi Strata I Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

KRISNAWATI SETYANINGRUM
C100160232

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS YURIDIS TERHADAP CERAI GUGAT DIKALANGAN
TENAGA KERJA WANITA (TKW)
(Studi Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt.)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:


KRISNAWATI SETYANINGRUM

C100160232

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing


(Dr.Rizka., S.Ag.,M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP CERAI GUGAT DIKALANGAN
TENAGA KERJA WANITA (TKW)
(Studi Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt.)**

OLEH

KRISNAWATI SETYANINGRUM

C100160232

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Kamis, 20 Februari 2020
Dan dinyatakan memenuhi syarat.**

Dewan Penguji:

1. Dr. Rizka., S.Ag., M.H

(.....)

(Ketua Dewan Penguji)

2. Mutimatun Ni`ami., SH.,M.Hum

(.....)

(Anggota I Dewan Peguji)

3. Nuswardani., S.H., S.U

(.....)

(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surkarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah ditunjukkan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila nanti terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 Februari 2020

Yang Memberi Pernyataan



Krisnawati Setyaningrum

NIM. C100160232

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP CERAI GUGAT DIKALANGAN
TENAGA KERJA WANITA (TKW)
(Studi Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt.)**

Abstrak

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tetapi tujuan tersebut mungkin tidak tercapai karena adanya perceraian. Seperti kasus cerai gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan cerai gugat di kalangan TKW dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat berdasarkan Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt. Metode Pendekatan yang digunakan ialah metode normatif, untuk mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dengan peristiwa dan hasil wawancara. Hasil penelitian ini bahwa alasan cerai gugat dikalangan TKW karena adanya faktor perselisihan, faktor ekonomi, faktor nafkah dari suami, dan faktor orang ketiga. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat ialah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta menurut hukum Islam jika keduanya tidak dapat disatukan kembali maka hukum perceraian menjadi wajib bagi keduanya.

Kata Kunci : Perkawinan, Cerai Gugat, Tenaga Kerja Wanita

Abstract

The aims of marriage is happy and eternal family. But the aims not to achieve because divorce. Such as the case divorce among the Female Labor (TKW). The aims of this research is knowing determine the reasons for divorce TKW and the consideration of judges in granting reason of divorce TKW be based on the court religion Magetan decision number 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt. The approach method is use normative, to examines application the regulations of marriage with the events in the decision and results of interview. The results of this research is the reason for divorce TKW is because of the ongoing disputes, economic factors, livelihood factors, and third-person factors. The considerations used by the judges is Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning marriage and Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law, and Islamic law if both of them cannot be allied then divorce law becomes obligatory for both.

Keywords : Marriage, Suit Divorce, Labor Woman

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam agama Islam disebut dengan “nikah” adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan suami istri, guna membentuk keluarga yang bahagia dengan cara-cara yang diridhoi Allah Swt.¹ Tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”. Hal ini telah tertuang dalam Q.S. Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam undang-undang dan agama Islam menginginkan agar tujuan perkawinan dapat tercapai, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan berujung pada perceraian.² Dewasa ini perceraian sebagai masalah yang marak terjadi di masyarakat khususnya cerai gugat. Perceraian dapat dipicu karena faktor ekonomi, faktor adanya orang ketiga atau perselingkuhan, maupun faktor moral atau akhlak suami atau istri, salah satu pihak melakukan penganiyaan, pelecehan, berzina dan terlibat dalam tindak pidana.³

Adanya masalah ekonomi tersebut mendorong istri untuk bekerja diluar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) baik di Negara Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia, dan negara lainnya. Dengan bekerjanya istri sebagai TKW

¹ Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty, hal 8.

² H. Sudirman L, *Dominasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap (Polemik dan Isu Gender dalam Kasus Perceraian di PA Sidrap)*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 11, No. 2, Juli 2013, hal. 191.

³ Sulthon Miladiyanto, *Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian Di Kabupaten Malang*, Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol. 1, No.1, Juni 2016, hal. 55.

mengakibatkan istri tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga berdampak bagi kehidupan rumah tangga.⁴ Masalah-masalah dalam rumah tangga tersebut dapat menyebabkan istri yang bekerja sebagai TKW mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama.

Kasus cerai gugat dialami pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Kabupaten Magetan Jawa Timur. Sejak tahun 2013 terjadi perselisihan yang disebabkan karena suami (Tergugat) tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. sehingga Penggugat bekerja menjadi TKW, selain itu Tergugat juga memiliki wanita idaman lain bahkan sudah menikah sirri. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai 2018 sehingga tidak ada hubungan lahir dan batin antara keduanya

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya cerai gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) berdasarkan Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt.?
- 1.2.2 Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) berdasarkan putusan nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Mengetahui alasan cerai gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW), dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat Tenaga Kerja Wanita (TKW) berdasarkan Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Bagi Penulis, dan masyarakat diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam tentang cerai gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Bagi ilmu pengetahuan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum Islam khususnya hukum keluarga Islam

⁴ Luluk Shoviana dan Zahrotun Navish Abdillah, *Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tempur Kecamatan Keling kabupaten Jepara)*, Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, Vol. VIII, No. 1, 2019, hal. 88.

mengenai cerai gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) serta hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti-peneliti selanjutnya

2. METODE

Metode Pendekatan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan hukum normatif atau disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif ialah penelitian dengan mengkaji penerapan peraturan tertulis dalam peraturan-perundang-undangan.⁵ Penelitian ini mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji peristiwa cerai gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif, untuk menggambarkan kondisi dimasyarakat. Penelitian ini menggambarkan peristiwa cerai gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) berdasarkan Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, maupun sekunder yang berhubungan dengan cerai gugat dikalangan TKW dan wawancara yakni dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pelaku cerai gugat TKW. Analisis data yang digunakan ialah analisis data deduktif menggunakan premis mayor kemudian dikaitkan dengan premis minor kemudian akan menghasilkan konklusi atau kesimpulan.⁶

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor Terjadinya Cerai Gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Berdasarkan Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt.

Faktor-faktor terjadinya cerai gugat TKW berdasarkan Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Perselisihan terus-menerus

⁵ Ammiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 118.

⁶ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yaaysan Obor Indonesia, hal. 11.

Pada posita point 4 telah disebutkan jika awal menikah kehidupan mereka berjalan secara harmonis. Akan tetapi sejak awal tahun 2013 keadaan rumah tangga keduanya mulai goyah karena keduanya sering berselisih. Perselisihan yang terus-menerus terjadi dalam rumah tangga diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum. Dalam agama Islam jika antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan maka hukum perceraian menjadi wajib bagi keduanya.

2) Faktor Ekonomi

Berdasarkan posita point 4 huruf (a) dinyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap bahkan jarang bekerja dan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan tersebut yang menyebabkan Penggugat terpaksa bekerja sebagai TKW ke luar negeri di Hongkong sejak tahun 2013. Meskipun masalah ekonomi bukan sebagai alasan istri mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun masalah ekonomi inilah dapat memicu timbulnya perselisihan.

3) Faktor Nafkah dari Suami

Pada posita point ke 4 huruf a dan b disebutkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat jarang bekerja dan bekerja untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan Penggugat dan anaknya. Salah satu kewajiban suami yaitu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang disesuaikan dengan kemampuannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

4). Faktor Wanita Idaman Lain (WIL)

Dalam posita point ke ke 4 huruf c dinyatakan bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dimana wanita tersebut merupakan tetangga desa Tergugat dan hubungan keduanya masih

berlanjut hingga tahun 2018, bahkan keduanya telah menikah sirri dan memiliki anak. Didalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan adanya orang ketiga sebagai alasan bagi salah satu pihak untuk mengajukan cerai. Namun faktor adanya orang ketiga ini (wanita idaman lain) dapat menjadi faktor timbulnya perselisihan yang berujung pada perceraian.

Kasus cerai gugat juga terjadi pada TKW Ibu Sum yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :

1) Faktor Perselisihan Terus-menerus

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sum, awal pernikahan rumah tangga keduanya berjalan harmonis, tetapi setelah Ibu Sum berkerja ke Hongkong, kehidupan rumah tangga sudah tidak berjalan harmonis. Dikarenakan terus-menerus terjadi perselisihan. Perselisihan yang terus-menerus terjadi dalam rumah tangga diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

2) Faktor Ekonomi

Bahwa sebelum Ibu Sum bekerja sebagai TKW ke Hongkong hanya suami yang bekerja sebagai petani. Kebutuhan ekonomi yang semakin banyak sedangkan penghasilan suami yang tidak cukup untuk memenuhinya, membuat Ibu Sum bekerja sebagai TKW ke Hongkong. Peraturan perundang-undang tidak mengatur masalah ekonomi sebagai alasan mengajukan perceraian. Namun hal tersebut dapat memicu perselisihan yang berakhir dengan perceraian.

3) Faktor Nafkah dari Suami

Namun selama Ibu Sum mengirim uang suaminya menjadi malas bekerja dan hanya bergantung pada penghasilan Ibu Sum. Bahkan ia dan anak-anaknya tidak pernah diberikan nafkah sedikit pun oleh suaminya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum

Islam yakni memiliki makna suami memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan memberikan nafkah disesuaikan dengan kemampuannya.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt.

Menurut Sudikno Mertokusumo, “putusan ialah pernyataan dari Hakim sebagai pejabat negara dan diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa.⁷ Salah satu isi putusan adalah pertimbangan/ *considerant*. Pertimbangan/ *considerant* yaitu dasar dari suatu putusan.⁸ Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan cerai gugat TKW dan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat. Berdasarkan Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni mengenai alasan bagi salah satu pihak mengajukan perceraian bahwa antara keduanya terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak dapat bersatu kembali. Karena berdasarkan surat gugatan Penggugat dan fakta dipersidangan terbukti bahwa keduanya terus-menerus terjadi perselisihan yang disebabkan beberapa hal yakni Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat memiliki wanita idaman. Selain itu menurut hukum Islam bahwa hukum perceraian menjadi wajib jika suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak dapat disatukan kembali. Meskipun seorang Hakam baik dari suami maupun istri telah berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil maka jalan yang dipilih antara keduanya yaitu bercerai. Karena apabila rumah tangga terus dilanjutkan maka akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

⁷ M. Rum Nessa dkk, 2016, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal.163

⁸ Burhanuddin Hasan, dan Harinanto Sugiono, 2015, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 132.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka kesimpulannya sebagai berikut :

- 1) Faktor-faktor terjadinya cerai gugat TKW berdasarkan Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt dan hasil wawancara dengan Ibu Sum (TKW yang mengajukan cerai gugat) adalah faktor perselisihan terus-menerus terjadi, faktor ekonomi, faktor nafkah dari suami dan faktor adanya wanita idaman lain (WIL).
- 2) Pertimbangan Majelis hakim yang digunakan untuk mengabulkan cerai gugat berdasarkan Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt yakni Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah bercerai. Selain itu menurut hukum Islam jika suami istri terus-menerus terjadi perselisihan maka bagi keduanya berserai menjadi wajib untuk dijalankan, meskipun Hakam telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil.

4.2. Saran

Bagi pasangan suami istri, yang istrinya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri maka hak dan kewajiban istri dialihkan kepada suami dan keluarga. Meskipun istri bekerja untuk membantu suami mencari nafkah, suami harus tetap menjalankan hak dan kewajibannya yakni tetap memberikan nafkah kepada keluarga, serta menggantikan peran istri dalam keluarga. jika terjadi perselisihan yang disebabkan beberapa masalah seperti maslaah ekonomi maka hal tersebut dapat dibicarakan baik-baik dengan menjaga komunikasi antara keduanya dan keluarga.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terima kasih dan mempersembahkan Karya Ilmiah ini kepada *Pertama*, Bapak, Ibu, Kakak-kakak, dan Adik-adik atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan kepada penulis. *Kedua*, Ibu Dr. Rizka.,S.Ag.,

M.H atas bimbingan, saran dan nasehat kepada Penulis. *Ketiga*, kepada semua pihak yang membantu penulis menyelesaikan Karya Ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Burhanuddin, dan Harinanto Sugiono, 2015, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yaaysan Obor Indonesia.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty.
- Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam
- L. H. Sudirman , *Dominasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap (Polemik dan Isu Gender dalam Kasus Perceraian di PA Sidrap)*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 11, No. 2, Juli 2013.
- Miladiyanto , Sulthon, *Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian Di Kabupaten Malang*, Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol. 1, No.1, Juni 2016.
- Nessa, M. Rum dkk, 2016, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Shoviana, Luluk dan Zahrotun Navish Abdillah, *Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tempur Kecamatan Keling kabupaten Jepara)*, Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, Vol. VIII, No. 1, 2019.